

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Effendi, Orien, *Hukum dalam Masyarakat: Kritik dan Saran Menuju Keterbukaan Penerapan Hukum*, Penerbit BRIN, Jakarta, 2024.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.
- Ismail, *Etika Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red and White Publishing, Jakarta, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020.
- Permana, Deni Yusup, "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", dalam Anik Ifitah (ed), *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten, 2023.
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016.
- Prayitno, Dessy Eko, dkk., *Penafsiran atas Pengecualian dalam Hak atas Informasi: Pengalaman di Indonesia dan Negara Lain*, Centre for Law and Democracy dan Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 2012.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Saragih, Ahmad Alamsyah, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Subagiyo, Henri, dkk., *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022.
- Yudithia, *Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Publik*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2022.
- Zamroni, M., *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2024.

JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

- Apandi, M., dkk., "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 12, 2024.
- Apsari, I Gusti Ayu, "Implementasi Nilai Keseimbangan Hukum Gustav Radbruch dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Djou, Ana Maria Gadi, Sri Hartati, dan Heri Budianto, "Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara Atas Keputusan Administratif Yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 12, 2024.
- Fadhillah, S., A. Yuli Tauvani, dan Karlina Rahayu, "Problematika Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat Dan Supremasi Konstitusi Di Indonesia", *Nunquam Moriuntur*, Vol. 5, 2025.

- Fahlevy, Riza, dkk., "Transparansi Informasi Penanganan Perkara Pidana oleh Denpom I/6 Batam: Antara Kepentingan Publik dan Rahasia Penyidikan", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6 No. 4, 2026.
- Hakim, D. N., F. Ramadan, dan Y. I. Cahyono, "Studi Pemanfaatan Big Data Dalam Perumusan Kebijakan Publik Pada Sektor Kesehatan", *SPECTA Journal of Technology*, Vol. 5 No. 3, 2021.
- Harahap, Aflah Ni'mah dan Ramadani, "Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik", *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, 2025.
- Hasiholan, Theodorus Agustinus, "Mengimplementasikan New Open Government sebagai Alat Pendukung Program Prioritas Kabinet Merah Putih", *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2025*, Vol. 6 No. 7, 2025.
- Hati, Diana Permata, dkk., "Sistem Merit sebagai Instrumen Good Governance dalam Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi", *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 5 No. 6, 2026.
- Indah, Reviana Mutiara dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3 No. 4, 2025.
- Kesuma, Fajar Tri, dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Asas Kecermatan Pada Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12 No. 5, 2025.
- Khumairoh, Umi dan Widodo Agus Setianto, "Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Melalui Layanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta", *KOMUNIKASI: Jurnal Komunikasi*, Vol. 14 No. 2, 2023.
- Kristiyanto, Eko Noer, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 2, 2016.
- Kurnia, Nilam dan Arif Wibowo, "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perspektif Di Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1, 2023.

- Maryanti, Sri, dkk., "Diseminasi Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Banjar Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal MODERAT*, Vol. 8 No. 3, 2022.
- Meilani, Retno dan Vina Hardyana Infantri, "Analisis Kekaburan Norma Hukum dan Risiko Maladministrasi dalam Tata Kelola BPI Danantara", *Inovasi*, Vol. 4 No. 2, 2025.
- Musyari, Fadhlurrahman dan Giska Sabrina, "Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Kajian Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 3, 2023.
- Nilasari, Vivi, Aldri Frinaldi, dan Roberia, "Hukum Administrasi Negara dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 7 No. 4, 2025.
- Ramadhan, Taufiq, dkk., "PELANGGARAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB): STUDI KASUS KORUPSI EKS CAMAT MEDAN MAIMUN", *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, Vol. 10 No. 3, 2026.
- Rattu, Rachel Indira Natasha, Debby Telly Antow, dan Jolly Ken Pongoh, "Analisis Hukum Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Kabupaten Minahasa", *Lex Crimen*, Vol. 14 No. 1, 2025.
- Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12 No. 2, 2022.
- Rindi, Tin Qadriana Anaway dan Ahmad Sholikhin Ruslie, "Legalitas Rangkap Jabatan Menteri Dalam Prespektif UU No. 39 Tahun 2008", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4 No. 4, 2025.
- Sapardiyono, Galih Bagas Soesilo, dan Agus Budi Santoso, "Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Uji Konsekuensi: Studi Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Purworejo", *Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2025.

- Saputro, Baruna Poking Bagus, "Public Information Dispute Resolution (Perspective of the State Administrative Court Act and the Public Information Disclosure Act)", *UNNES Law Journal*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Sarifurohman, Bobi Wartono H.S., dan Maman Sukarso, "Problematika Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Keputusan Administratif", *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 3 No. 1, 2026.
- Shabrina, T. dan Tamsil, "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN-JKT)", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 4, 2020.
- Siregar, Mardona, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia", *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 8 No. 2, 2024.
- Siregar, Moh. Baris, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Sudirman, dkk., "Analisis Implementasi AUPB Dalam Rekrutmen Pejabat di Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Vol. 12 No. 1, 2024.
- Sudrajat, Odi Salsabilla Kirana Fitri, Ikomatussuniah, dan Rila Kusumaningsih, "Efektivitas Penghentian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Itikad Baik di Komisi Informasi Provinsi Banten", *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1, 2026.
- Sumantri, Ii, "Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi Di Indonesia", *Journal of Sciencetech Research and Development*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Surya, Ida dan Abdul Wahab, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Kompilasi Hukum*, 2023.
- Syafar, Irfan, dkk., "Pendampingan Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis AUPB Pada Pemerintahan Desa Patani, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar", *ININNAWA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 1, 2026.
- Untang, Ruben Chiesa, Verlyn Adelaide Tzurriel Shillo, dan Livia Leta Dharmawan, "Asas Keterbukaan Dalam Putusan PTUN: Antara Transparansi Administratif

dan Batas Informasi Yang Dikecualikan", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6 No. 4, 2026.

Wijaya, Al Pansya dan Syamsir, "Kekaburan Prosedural Pemberian Amnesti dan Abolisi oleh Presiden Secara Konstitusional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, Vol. 3 No. 1, 2026.

Yulida, Devi, Kartika Widya Utama, dan Xavier Nugraha, "Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, 2008.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160, 2010.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, 2014.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, 2021.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/KI/2023/PTUN.JKT, tanggal 8 Juni 2023.